

AMNESTY INTERNATIONAL

PERNYATAAN PUBLIK

Index: ASA 21/024/2014
5 September 2014

Indonesia: Pemerintahan yang baru harus menuntaskan kasus pembunuhan pembela HAM Munir

Amnesty International mendesak Presiden-terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk memastikan bahwa rencananya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu juga mencakup akuntabilitas bagi kasus pembunuhan pembela HAM Munir Said Thalib. Setelah perjuangan satu dekade, kemenangan Jokowi membawa secercah harapan bagi keluarga Munir dan kawan-kawannya bahwa semua pelaku akan dibawa ke muka keadilan.

Munir merupakan pejuang HAM terkenal di Indonesia, yang mengangkat perjuangan kasus penghilangan paksa belasan aktivis yang menjadi korban penghilangan paksa selama bulan-bulan terakhir pemerintahan Suharto pada 1998. Munir juga berperan penting dalam mengungkapkan bukti pertanggungjawaban militer atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh dan Timor-Leste.

Munir ditemukan tewas dalam penerbangan Garuda dari Jakarta menuju Amsterdam pada 7 September 2004. Sebuah autopsi yang dilakukan oleh otoritas Belanda menunjukkan bahwa Munir tewas akibat racun arsenik. Meskipun tiga orang dari maskapai Garuda telah divonis bersalah atas pembunuhan tersebut, ada tuduhan yang kredibel bahwa mereka yang bertanggung jawab di tingkat tertinggi di pemerintahan belum dibawa ke muka hukum.

Pada 2008, Muchdi Purwoprandjono, mantan deputi kepala dari Badan Intelijen Negara, bebas dari dakwaan membantu dan mendorong pembunuhan Munir. Organisasi-organisasi HAM menyimpulkan bahwa persidangannya tidak sesuai dengan standar-standar internasional akan keadilan setelah saksi-saksi kunci menarik kembali keterangan tersumpah mereka dan gagal bersaksi di persidangan. Pada Februari 2010, Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) juga mengidentifikasi cacat-cacat dari investigasi kepolisian, penuntutan, dan persidangan Muchdi dan merekomendasikan investigasi baru dari kepolisian.

Amnesty International mendesak Jokowi untuk menginisiasi sebuah investigasi yang independen dan baru atas pembunuhan Munir dan membawa pelaku-pelaku di segala tingkatan ke muka hukum dengan cara-cara yang sesuai dengan standar-standar HAM internasional. Sebagai langkah kunci menuju pencarian kebenaran, pihak-pihak berwenang juga harus membuka ke publik laporan Tim Pencari Fakta (TPF) 2005 resmi atas pembunuhan Munir yang dilaporkan menyebut keterlibatan pejabat-pejabat senior lembaga intelijen.

Jokowi juga harus menginstruksikan Jaksa Agung untuk melakukan evaluasi terhadap proses hukum yang lalu atas kasus ini, termasuk dugaan pelanggaran atas standar-standar HAM internasional.

Minimnya akuntabilitas dalam kasus Munir menyumbang pada iklim ketakutan yang terus berlangsung di antara para pembela HAM. Meskipun ada komitmen dari pemerintah Indonesia untuk menyediakan perlindungan yang memadai bagi para pembela HAM – termasuk pada evaluasi Peninjauan Berkala Universal (UPR) di Dewan HAM PBB pada Mei 2012 – mereka masih diancam, diintimidasi, dan diserang karena kerja-kerja mereka.

Pemerintahan yang baru harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap para pembela HAM akan diinvestigasi secara cepat, efektif, dan imparial, dan mereka yang bertanggung jawab dibawa ke muka hukum

dalam peradilan yang adil. Lebih lanjut, pemerintahan yang baru harus mendukung pengesahan undang-undang khusus yang ditujukan untuk menyediakan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pembela HAM.

Pada 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa penuntasan kasus pembunuhan Munir akan menjadi sebuah “ujian bagi sejarah kita”, bagi proses demokrasi Indonesia. Banyak orang Indonesian saat ini percaya bahwa ia telah gagal menghadapi ujian ini. Menjadi harapan kami bahwa rekam jejak HAM Jokowi akan lebih baik, dan penantian panjang keluarga Munir bagi keadilan akan segera berakhir.

Sebuah petisi Amnesty International kepada Presiden-terpilih Jokowi menyerukan akuntabilitas atas kasus pembunuhan Munir bisa ditemukan di:
<https://campaigns.amnesty.org/actions/resolve-munir-killing-case>